

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Pada umumnya pembangunan ekonomi dititikberatkan pada pembangunan di bidang sumber daya, karena meningkatnya hasil-hasil di bidang ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber dana pembangunan sehingga dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan dan didorong oleh pembangunan bidang lain yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang diambil dalam pembangunan ekonomi selalu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Definisi pembangunan ekonomi menurut Sukirno (2006:11-13) meliputi (1), serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dan perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi, (2), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu dapat diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun tetapi

juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran, perkembangan pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur yang tersedia sehingga dapat menunjang peningkatan pendapatan dan kemakmuran rakyat. Selama ini strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonomi, dari struktur yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Namun demikian perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia masih terjadi pada level nasional, sedangkan level daerah tidak semua daerah memperoleh manfaat pembangunan ekonomi secara nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan adanya pengaturan pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan oleh undang-undang. Istilah yang bersifat otonom adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Era baru Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2001. Proses pelaksanaan diwarnai dengan

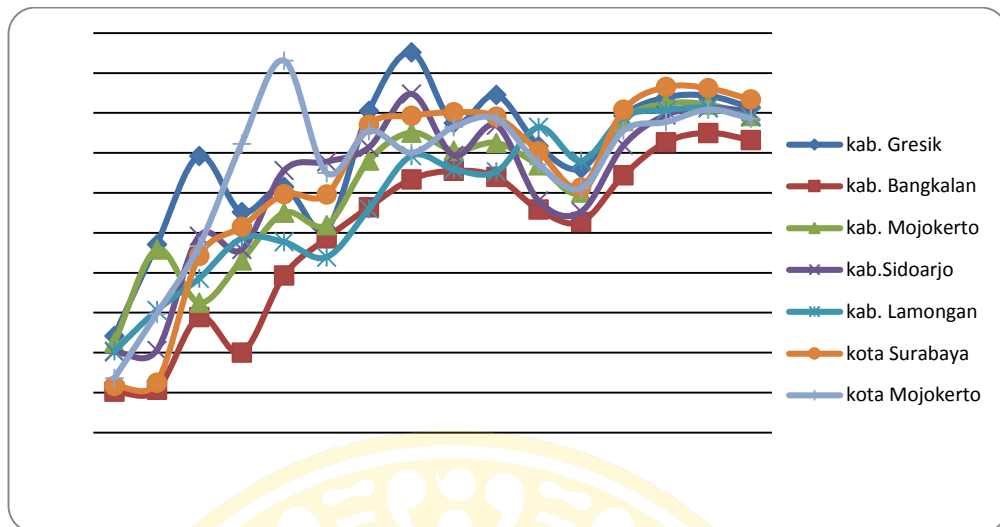
berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yaitu UU No. 32 tahun 2004 menggantikan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU No. 33 tahun 2004 menggantikan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD)

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Melalui UU No. 22 tahun 1999 diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya desentralisasi fiskal hanya mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian Rizal (2013) ditemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menggambarkan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat diantaranya telah tepat, yakni digunakan pada belanja modal.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, maka pertumbuhan menjadi pedoman dan ukuran keberhasilan pembangunan yang selanjutnya berguna menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets dalam Jhingan (2000:78) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh

adanya kenaikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan target pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah. Menurut Sukirno (2006:11) jika dalam jangka panjang terjadi proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat dalam wilayah tertentu meningkat, maka wilayah tersebut telah mengalami pembangunan ekonomi.

Salah satu pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia yang cukup tinggi berada di Provinsi Jawa Timur. Prioritas pengembangan Provinsi Jawa Timur berada pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Gerbangkertasusila. Wilayah Gerbangkertasusila merupakan kawasan andalan di provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila sejalan dengan fungsi dan peranannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga ke wilayah Indonesia Timur. Namun dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertasusila, tidak semua kabupaten di wilayah Gerbangkertasusila memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada wilayah Gerbangkertasusila tidak semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki daerah-daerah di wilayah Gerbangkertasusila.



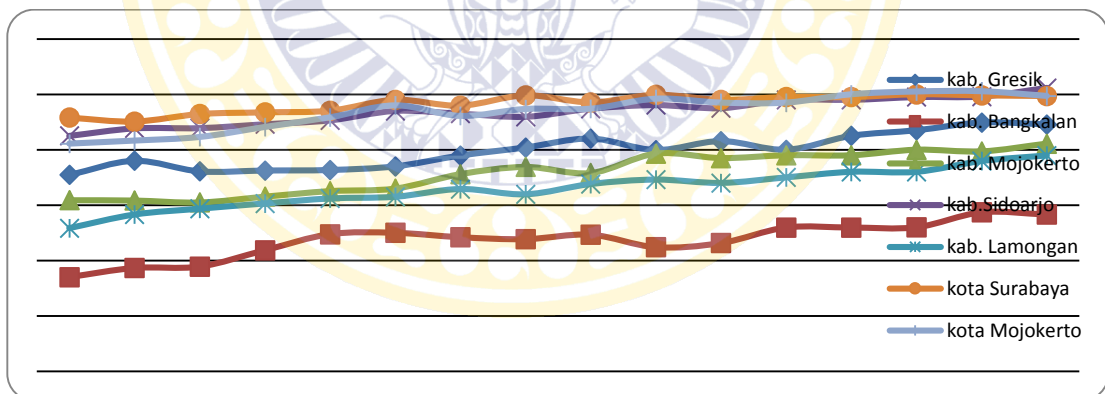
Sumber : BPS Jawa Timur, 1998-2013

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Gerbangkertasusila
Tahun 1998-2013(persen)

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila pada tahun 1998 sampai tahun 1999 sangat rendah. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertasusila membaik setelah tahun 2001 sampai 2013, seperti kota Mojokerto pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi sebesar 8,31 persen yang diikuti kabupaten dan kota lainnya yang pertumbuhannya sudah di atas 3 persen.

Menurut Gambar 1.1 terlihat adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota di wilayah Gerbangkertasusila. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut disebabkan beberapa hal yaitu adanya faktor sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda, mulai dari tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sumber daya manusia berperan penting dalam suatu kegiatan ekonomi karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Menurut Jhingan, (2010:414) peranan pendidikan dalam pembangunan modal manusia sangatlah penting. Dalam hal ini pendidikan menjadi penghubung antara manusia dengan ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan dan keterampilan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian Son (2013) ditemukan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi 5 kelompok negara Uni Eropa. Dari hasil penelitian tersebut kualitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa modal awal manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang merupakan kunci pembangunan ekonomi.



Sumber : BPS Jawa Timur, 1998-2013

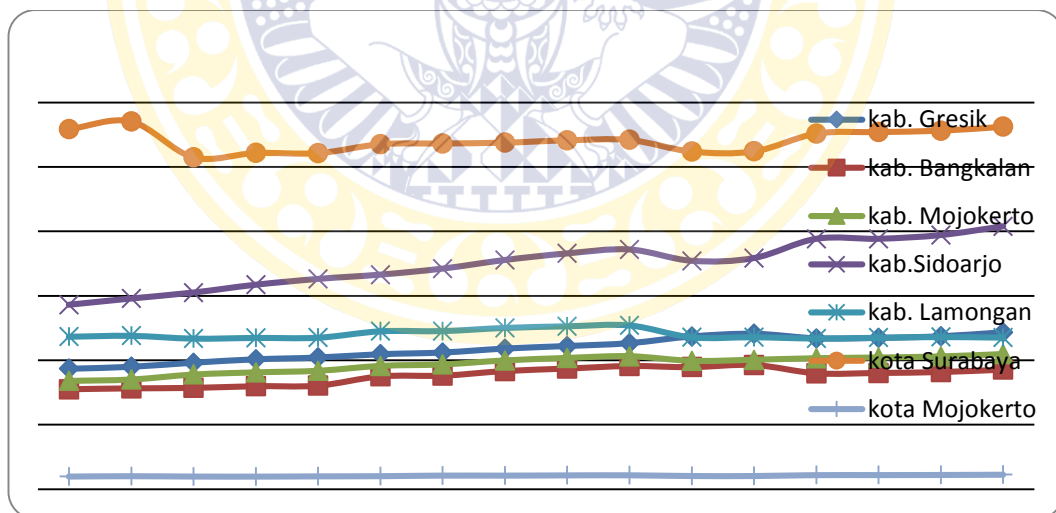
Gambar 1.2
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Di Wilayah Gerbangkertasusila Tahun 1998-2013 (Tahun)

Gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa selama tahun 1998 sampai tahun 2013 terdapat perbedaan rata-rata lama sekolah yang signifikan, yaitu pada Kabupaten Bangkalan yang rata-ratanya masih di bawah 6 tahun, sedangkan di wilayah lain

seperti Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto memiliki rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi yaitu di atas 8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Bangkalan memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan ekonomi.

Menurut Sukirno (2006:77) faktor lainnya yang dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Penduduk dianggap dapat memberikan sumbangan positif bagi pembangunan karena beberapa hal :

1. Perkembangan jumlah penduduk akan memperluas pasar.
2. Peningkatan dalam mutu dan keahliannya bisa mengakibatkan hal-hal positif dalam pembangunan.
3. Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam kegiatan pembentukan modal.



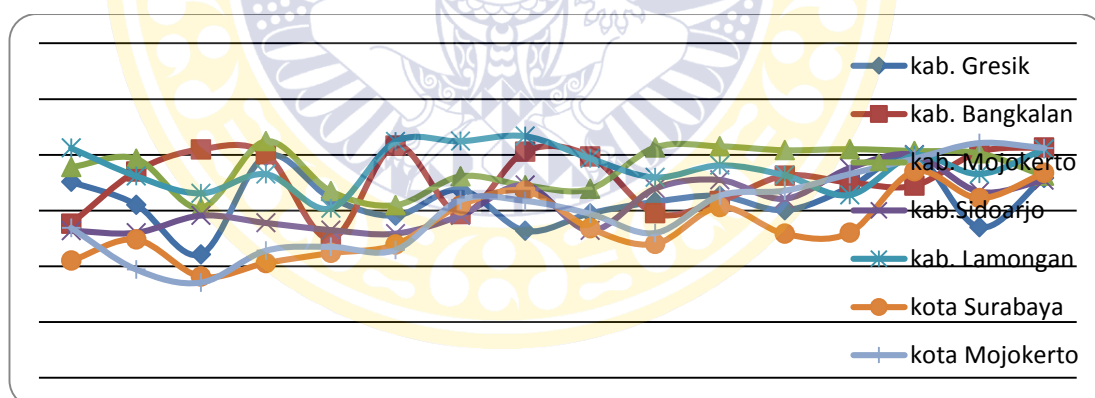
Sumber : BPS Jawa Timur

Gambar 1.3
Jumlah penduduk Kabupaten/Kota wilayah Gerbangkertosusila
Tahun 1998-2013 (Jiwa)

Menurut Gambar 1.3, jumlah penduduk wilayah Gerbangkertosusila terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS)

pada tahun 1998 jumlah penduduk wilayah Gerbangkertasusila tercatat sejumlah 8.127.822 jiwa. Sampai tahun 2013 data jumlah penduduk wilayah Gerbangkertasusila yang tercatat BPS meningkat menjadi 9.403.509 jiwa. Namun, menurut Sukirno (1982:333) pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan faktor-faktor produksi lainnya. Selain jumlah penduduk, pengukuran sumber daya manusia secara kuantitas adalah melalui tingkat partisipasi angkatan kerja.

Salah satu keberhasilan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peran tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah. Tenaga kerja merupakan input dari suatu proses produksi. Besaran atau jumlah dan kualitas tenaga kerja akan berpengaruh secara langsung terhadap output yang dihasilkan.



Sumber : BPS Jawa Timur

Gambar 1.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja wilayah Gerbangkertasusila
Tahun 1998-2013 (persen)

Berdasarkan Gambar 1.4, tingkat partisipasi angkatan kerja wilayah Gerbangkertasusila periode tahun 1998 sampai 2013 berfluktuatif antara 60 persen sampai 70 persen. Pada era sebelum desentralisasi fiskal tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi terdapat pada kabupaten Lamongan pada tahun 1998

dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,61 persen dan terendah terdapat di Kota Mojokerto pada tahun 2000 yang tingkat partisipasi angkatan kerjanya hanya 58,54 persen. Sedangkan pada era desentralisasi tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi terdapat pada Kabupaten Lamongan pada tahun 2005 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,67 persen dan terendah terdapat di Kota Surabaya pada tahun 2001 yang tingkat partisipasi angkatan kerjanya hanya 60,29 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila menjadi salah satu pertimbangan dalam tujuan perencanaan pembangunan. Tingkat pendidikan dan jumlah pertumbuhan penduduk diharapkan mampu membuka peluang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah, sehingga mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, sangatlah penting melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan desentralisasi fiskal terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah Gerbangkertasusila.

1.2. Rumusan masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan diantaranya adalah apakah rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis apakah rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan desentralisasi fiskal terhadap laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, untuk mengetahui dan memahami pengaruh tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan desentralisasi fiskal terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertasusila.
2. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pembaca dan peneliti-peneliti lain yang tertarik dalam bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan.
3. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fungsi sumber daya manusia dan desentralisasi fiskal terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah Gerbangkertasusila.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian yang akan dicapai dan manfaat yang diperoleh serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab 2 menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari permasalahan yang telah dirumuskan, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan penelitian ini, pada bab 2 dilengkapi dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab 4 ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil dari penelitian serta akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Pada bab 5 ini akan diuraikan kesimpulan penulis dari hasil analisis serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkemungkinan.